

## BIN Gelar Vaksinasi Covid-19 Door to Door di Bandung Barat

JAKARTA (IM) - Jajaran Badan Intelijen Negara (BIN) menggelar vaksinasi Covid-19 door to door dan pembagian sembako di Bandung Barat. Tepatnya Jalan Bantar Gedang, Mekarsari, Kecamatan Ngamparah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Kegiatan yang dilaksanakan di antaranya pembagian sembako kepada masyarakat kurang mampu, vaksinasi massal, dan vaksinasi Covid-19 door to door dan pembagian sembako di perkampungan.

"Pada hari ini sesuai arahan Bapak Presiden, BIN menyelenggarakan Vaksinasi door to door kepada masyarakat dan pelajar ke pelosok-pelosok di 6 Provinsi yaitu Jabar, Jateng, Banten, Kaltim Riau, dan Sulsel dengan Target 10 Ribu Vaksin," demikian keterangan tertulis BIN yang diterima

wartawan, Minggu (18/7).

Program vaksinasi Covid-19 tersebut merupakan akselerasi program 3 juta dosis vaksin per hari sehingga target herd immunity atau kekebalan komunal bisa mencapai 70 persen pada akhir tahun 2021.

"Selain kegiatan vaksinasi, BIN juga memberikan Bansos berupa sembako dan pa-ket vitamin imunitas Covid-19 masing-masing sebanyak 10 ribu paket di 6 provinsi kepada masyarakat terdampak akibat pandemi Covid-19," tulis keterangan tertulis tersebut.

BIN pun mengingatkan agar seluruh masyarakat tetap disiplin protokol kesehatan agar bisa menghentikan penyebaran Covid-19. "Mari tetap kita patuhi protokol kesehatan dan berdoa semoga Pandemi ini segera berakhir," tulis keterangan dari BIN. ● me

## Ditjen PAS Sebut Foto Setnov Bawa HP Terjadi pada Tahun Lalu

JAKARTA (IM) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pas Kemenkumham menyatakan bahwa beredar foto terpidana kasus Korupsi Setya Novanto (Setnov) yang sedang memegang telepon selular (ponsel) di Lapas Sukamiskin merupakan foto tahun lalu.

Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol Ditjen Pas Kemenkumham Rika Aprianti menyebut foto tersebut diambil saat perayaan Idul Adha tahun lalu. "Itu foto tahun lalu, ketika Idul Adha, hari raya qurban. Jadi itu bukan foto sekarang," kata Rika kepada awak media, Minggu (18/7).

Menurut Rika, saat ini pihaknya terus melakukan pengetatan dan razia di dalam Lapas maupun Rutan untuk memastikan bahwa tempat

itu steril dari handphone dan narkoba.

"Sterilisasi terhadap barang-barang yang dilarang masuk juga sudah melibatkan kerjasama dengan jajaran Polri untuk melakukan razia rutin agar lapas dan rutan steril dari barang-barang terlarang dan narkoba," ujar Rika.

Sekadar diketahui, foto Setnov yang terlihat sedang duduk mengenakan baju berkerah biru dengan dua ponsel di hadapannya sempat viral di media sosial. Selain Setnov, dalam foto itu juga terlihat beberapa tahanan lainnya.

"Ini masukin berharga dan kami berjanji untuk semakin memperbaiki sistem dan pelaksanaannya yang ada di dalam lapas dan rutan," tutup Rika. ● me

# 2 | Polhukam



IDN/ANTARA

## WAKSINASI COVID-19 MASYARAKAT MARITIM

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (ketiga kanan) bersama Panglima Koarmada II Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto (keempat kanan) meninjau pelaksanaan Serbuan Vaksinasi Covid-19 di halaman Jalajaya, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (18/7). Komando Armada (Koarmada) II melakukan vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat maritim guna mewujudkan kekebalan komunal atau 'herd immunity' menuju Indonesia sehat.

# Pemerintah Didesak Cabut Permenkes yang Atur Vaksinasi Covid-19 Berbayar

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 berbayar dinilai tidak etis dilakukan. Apalagi hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum bisa mengakses vaksin Covid-19.

vaksinasi Covid-19 gotong royong individu berbayar.

Menurut Irma, meski Presiden Joko Widodo telah mengumumkan aturan itu dibatalkan, tapi Irma khawatir peraturan itu bisa disalahgunakan jika tidak dicabut.

"Kami mengapresiasi respons pemerintah membatalkan vaksin gotong royong individu berbayar. Tapi itu saja tidak cu-

kup. Saya kira kita masih harus waspada dan tetap mendesak dicabutnya PMK Nomor 19/2021 agar PMK ini di kemudian hari tidak disalahgunakan dan digunakan kembali sebagai basis hukum untuk menyelenggarakan vaksinasi berbayar," kata Irma dalam konferensi pers daring Koalisi Warga Akses Kesehatan, Minggu (18/7).

Irma mengatakan, khawatir kelak akan muncul vaksin berbayar itu bukan tanpa sebab. Sebab selama ini kebijakan pemerintah kadang tidak selaras dengan apa yang diucapkan.

"Sejarah menunjukkan, foot print pemangku kebijakan kadang-kadang apa yang disampaikan tidak selalu sama dengan apa yang dilakukan. Tidak selalu sama dengan kebijakan riil yang diambil di lapangan," tuturnya.

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 berbayar, menurut Irma, tidak etis dilakukan. Apalagi banyak masyarakat yang belum bisa mengakses vaksin Covid-19.

"Kita tahu vaksinasi masih sulit dijangkau. Masih banyak orang yang ingin divaksin tapi belum bisa divaksin. Kalau di Jakarta mungkin banyak informasi soal pembukaan sentra vaksinasi dan upaya-upaya oleh dinas kesehatan di tingkat provinsi, tapi di luar Jakarta tidak demikian," kata Irma.

Irma menegaskan, pemerintah harus memastikan semua masyarakat memiliki akses yang setara terhadap vaksin Co-

vid-19. Kesehatan merupakan hak tiap warga negara. Jika PT Kimia Farma mau membantu percepatan vaksinasi untuk menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity), maka bisa menyelenggarakan vaksinasi Covid-19 di seluruh apoteknya secara gratis.

"Kalau mau benar-benar berkontribusi, harusnya bisa membuka apoteknya, mendidihkan perusahaannya dan karyawannya tentu dengan memberikan insentif, membantu pemerintah untuk mempercepat vaksinasi," ujar Irma.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan membatalkan vaksin Covid-19 berbayar bagi individu yang sebelumnya direncanakan akan disalurkan melalui Kimia Farma. Dengan demikian, seluruh vaksinasi akan tetap sesuai program seperti yang telah berjalan saat ini yakni gratis bagi seluruh masyarakat.

"Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam keterangannya, Jumat (16/7).

"Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya," katanya menambahkan. ● han



IDN/ANTARA

**PENYEMPROTAN DISINFECTAN KRI BIMA SUCI**  
Prajurit KRI Bima Suci melakukan penyemprotan cairan disinfektan di geladag utama lambung kanan KRI Bima Suci di Dermaga Armada II, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (17/7). Penyemprotan tersebut dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran virus COVID-19 jelang pelayaran Kartika Jala Krida (KJK) Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) yang akan diikuti oleh para Taruna dan Taruni AAL tingkat III Angkatan ke-68 Tahun 2021.

## Sekjen PAN Ingatkan Kader Tidak Bermental "Mentang-mentang Pejabat"

JAKARTA (IM) - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengingatkan para kader partai, terutama yang duduk sebagai pejabat negara, agar tidak selalu minta distimewakan. Ia menegaskan, mental pejabat seperti itu tidak memiliki tempat di PAN.

"Kader PAN harus membuang jauh-jauh mental 'mentang-mentang pejabat', sehingga selalu minta didahulukan, diprioritaskan, dan distimewakan. Perilaku seperti itu tidak ada tempatnya di PAN," kata Eddy dalam keterangannya, Minggu (18/7).

Menurutnya, tidak boleh ada pejabat baik legislatif maupun eksekutif yang merasa dirinya lebih tinggi dari masyarakat. Eddy mengingatkan semua kader PAN wajib taat pada aturan dan perundang-undangan, termasuk yang bertalian dengan penanganan pandemi Covid-19.

"Tidak boleh ada kader PAN yang merasa statusnya di atas masyarakat umum," ujarnya.

Eddy pun menyatakan, DPP PAN akan memberikan

sanksi tegas kader yang melanggar atau melawan aturan khususnya di masa pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) ini. Dia menegaskan, pejabat publik semestinya jadi teladan bagi masyarakat.

"Pejabat publik hendaknya menjadi teladan dan panutan masyarakat dan bukan merasa memiliki privilese khusus," kata Eddy.

"Kami mendukung jika para pelanggar PPKM darurat dan mereka yang mengabaikan protokol kesehatan diberikan sanksi yang tegas tanpa terkecuali," tambahnya.

Sebelumnya, pernyataan dan sikap tiga politikus PAN terkait pandemi Covid-19 sempat memicu polemik. Ketua PAN yakni Gusardi Gaus yang mengaku tidak menjalani karantina saat baru tiba dari luar negeri.

Kemudian Wasekjen PAN Rosaline Rumaseuw yang meminta pemerintah membuat rumah sakit khusus pejabat. Menurut dia, pejabat negara mesti mendapatkan keistimewaan karena tugasnya memikirkan negara dan rakyat.

Ada pula Ketua DPP PAN Saleh Dauly yang meminta agar pemerintah dapat memastikan ketersediaan ICU bagi anggota DPR.

Hal itu ia sampaikan dalam rapat Komisi IX DPR bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadani Sadikin.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengaku telah menegur ketiga kadernya itu.

Ia sudah meminta agar hal tersebut tidak diulangi lagi di kemudian hari. ● me

JAKARTA (IM) - Inisiator koalisi Lapor Covid-19 Irma Hidayana meminta pemerintah

segera men-cabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 soal pelaksanaan

## Ketua KPK: Layaknya Virus Corona, Korupsi Mampu Beradaptasi dan Berevolusi

JAKARTA (IM) - Setiap tanggal 17 Juli, Indonesia turut memperingati Hari Keadilan Internasional atau World Day for International Justice, hari yang juga dikenal sebagai Hari Keadilan Pidana Internasional atau International Justice Day.

Seyogianya peringatan Hari Keadilan Internasional ini dijadikan momentum untuk lebih meningkatkan kewaspadaan akan ragam kejahatan kemanusiaan yang senan-tiasa mengancam eksistensi peradaban umat manusia.

"Korupsi adalah salah satu kejahatan kemanusiaan yang saat ini menjadi musuh bersama seluruh bangsa di dunia, tak terkecuali bangsa kita yang memiliki catatan dan sejarah kelam dengan kejahatan korupsi," ujar Ketua KPK dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (18/7).

Firli mengatakan, korupsi menjauhkan suatu bangsa di dunia dari kata kemakmuran, bahkan korupsi dapat menyebabkan gagalnya suatu negara mewujudkan tujuannya. Tak terhitung dampak mematikan korupsi yang menghancurkan setiap tatatan kehidupan suatu bangsa, membawa ketidakadilan, ketimpangan, kemiskinan serta keterbelakangan rakyat dalam sebuah negara.

Menurutnya, korupsi jelas menjadi tembok besar untuk mewujudkan salah satu tujuan kita dalam bernegara, yaitu memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi segenap rakyat Indonesia, mengingat korupsi bukan hanya merugikan perekonomian semata namun dapat meluluh lantakkan sendi-sendi kehidupan ber-bangsa dan bernegara di republik ini.

"Layaknya virus corona, korupsi terbukti mampu beradaptasi, berevolusi bahkan berinovasi dalam kondisi apapun, sehingga siapapun yang tidak menjaga imun anti-korupsi, dapat terpapar dan menularkannya ke orang-orang yang minim integritas, etika serta moral.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lahir dari rahim dan dibesarkan oleh rakyat, Insya Allah akan teguh menjalankan misi utama memberantas korupsi di negeri ini, agar tujuan bernegara dapat terwujud seutuhnya seperti cita-cita dan harapan Foundingfathers serta segenap bangsa Indonesia.

Memang bukan persoalan mudah, namun tidak terlampau sukar untuk mencabut jantung dan akar korupsi dari penjuru bumi pertiwi. Perlu konsistensi nasional dan segenap upaya memberantas korupsi di negeri ini.

Sebagai kejahatan kemanusiaan (crimes against humanity), korupsi yang dipandang dunia sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), memang harus di-tangani bersama oleh seluruh umat manusia di dunia khususnya bangsa Indonesia seperti yang diamanatkan negara dalam mukadimah UUD 1945.

"Kita segenap anak Bangsa Memiliki Harapan Indonesia yang kita cita-citakan bisa terwujud yaitu Indonesia yang bebas dan bersih dari Korupsi, Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang cerdas, Indonesia yang ikut aktif memelihara perdamaian dunia, dan Indonesia yang membangun seluruh rakyat Indonesia," tuturnya.

Hari Keadilan Internasional, sambungnya, jangan hanya menjadi seremoni tahunan semata namun makna dan esensi World Day for International Justice seharusnya menjadi momentum bagi bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia untuk meneguhkan imun antikorupsi diri sendiri, keluarga, teman, sahabat agar imunitas antikorupsi nasional dapat terwujud demi mewujudkan cita-cita Indonesia bebas dari korupsi. ● han



IDN/ANTARA

## IMBAUAN AGAR WARGA TIDAK MUDIK SAAT IDUL ADHA

Sejumlah calon penumpang melintas di area parkir bus AKAP di Terminal Bayangan Pondok Pinang, Jakarta, Minggu (18/7). Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengimbau masyarakat untuk membatasi mobilitas dan tidak mudik menjelang Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

**PENGUMUMAN**  
TELAH HILANG Asli Sertipikat Bekas Hak Guna Bangunan No 25 Sisa/Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yang terdaftar atas nama : ANG GIOK NIO, ANG HIAN NIE, ANG HIAN BO, ANG HIAN GIE, LIM PENG LAM dan LIM HONG SIAN NIO, masing-masing untuk 1/6 bagian, pada tanggal 02 Juli 2021 di Jalan Fly Over Kp. Melayu, Jakarta Timur

**GED**  
COURIER & LOGISTICS

**PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT TRIMUDA NUANSA CITRA Tbk.**

Dengan ini diumumkan kepada Para Pemegang Saham PT Trimuda Nuansa Citra Tbk ("Perseroan") bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") direncanakan akan diadakan pada hari Rabu, 25 Agustus 2021 di Jakarta.

Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada hari Selasa, 03 Agustus 2021 melalui iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan (www.ged.co.id) dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 02 Agustus 2021.

Setiap usulan mata acara Rapat dari Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan ke dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Usulan dan penjelasan harus disampaikan melalui surat tercatat kepada Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat pada jam kantor Perseroan.

Jakarta, 19 Juli 2021  
Direksi Perseroan

**PENGUMUMAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF ("KIK") DAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND ("SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND")**

Menindaklanjuti rencana perubahan KIK dan Prospektus SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND yang telah diumumkan melalui surat kabar harian "International Media" tertanggal 24 Juni 2021, Kami, PT Syailendra Capital, berkedudukan di Jakarta, selaku Manajer Investasi dari SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND, dengan ini mengumumkan bahwa telah dilaksanakannya perubahan KIK dan Prospektus SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND sebagaimana termaktub dalam akta addendum SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND.

Adapun rincian perubahan KIK dan Prospektus tersebut di atas dapat diperoleh di Manajer Investasi.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND serta pihak-pihak yang berkepentingan.

**SYAILENDRA** Jakarta, 19 Juli 2021  
Manajer Investasi  
**PT Syailendra Capital**  
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

reksa dana